Multifinance

KILAS

OJK Yakin Perusahaan Pembiayaan
Rebound Tahun Depan

KILAS

Perusahaan Pembiayaan
Bayar Obligasi

PERSPEKTIF

Perkembangan Bisnis
Pembiayaan Syariah Masih
Tak Semulus Konvensional

MANFAATKAN DIGITALISASI 4.0 UNTUK PELUANG PASAR INDUSTRI PEMBIAYAAN

NEW
From CONFINS

READY NOW!

Custom Your Own Core System

CONFINS.R3

Loan Origination System

**The New Adaptive
Core System Platform**

Book Your Schedule
For a Demo

And Get
**Special
Price**

- ✓ Reducing Time to Market Exponentially
- ✓ Connected to Dukcapil, SLIK, Pefindo, and Other Third Party
- ✓ Built in Business Dashboard
- ✓ High Mobility Oriented
- ✓ OJK Compliance

Start From
Rp 13.990

Per Asset, Per Month

Special Offer Period
1 Oct - 30 Nov 2020

REQUEST
FOR DEMO

CONFINS

**100% Successful
Project Implementation**

69% of Indonesian financing companies that have more than 10 trillion worth of asset.

55% of Indonesian financing companies that have 5 to 10 trillion worth of asset.

KARYA ANAK BANGSA

BANGGA

marketing@ad-ins.com

0859 5900 8500

100%

Kepatuhan OJK

Solusi perangkat lunak, yaitu 100% sistem Indonesia ready dengan level pertama dukungan multibahasa.

Pengiriman Jarak Jauh / Bekerja dari Rumah

Mengirimkan tujuh proyek besar dari jarak jauh di tujuh negara berbeda selama Covid-19, yang mencerminkan kemampuan kami untuk beradaptasi.

3

Implementasi NFS Ascent yang berhasil di cloud

Pelaksanaan tiga kontrak baru utama yang berhasil untuk NFS Ascent di Cloud melalui harga berbasis langganan yang terjangkau dan fleksibel.

40%

Pengurangan Biaya

Perusahaan leasing power-sports AS secara signifikan mengurangi biaya layanan pelanggan melalui alat transformasi digital kami.

KAMI MEMBERIKAN SAAT YANG LAIN MENKLAIM

Dengan bangga melayani perusahaan multi-finance & leasing top dunia dengan teknologi perangkat lunak cerdas selama lebih dari empat dekade.

pindai kode QR untuk menjelajahi lebih lanjut

DAFTAR ISI

7 FOKUS

Manfaatkan Digitalisasi 4.0 untuk Peluang Pasar Industri Pembiayaan

Tujuh bulan telah berlalu sejak pandemi Covid-19 memasuki Indonesia. Jumlah korban terus bertambah, dan ekonomi masyarakat di kota dan daerah semakin terpuruk.

6 Sambutan

Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI
Tetap Jeli di Kala Pandemi

15 Kilas

- OJK Yakin Perusahaan Pembiayaan *Rebound* Tahun Depan
- Satgas Waspada Investasi Temukan 143 Usaha Gadai Ilegal Sejak 2019
- Penjagaan Arus Kas Jadi Tantangan Terbesar Perusahaan Pembiayaan
- Perusahaan Pembiayaan Bayar Obligasi
- PN Purwokerto Kabulkan Gugatan Batavia Prosperindo Finance Indonesia Cabang Purwokerto

- Berharap pada UU Cipta Kerja
- Menteri Keuangan Tolak Usulan Pajak Mobil Baru 0%
- Chatib Basri: Ekonomi Nasional Diprediksi Normal Pada 2022
- OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Setahun Lagi

29 Perpektif

Perkembangan Bisnis Pembiayaan Syariah Masih Tak Semulus Konvensional

32 Kegiatan Forum Komunikasi Daerah (FKD)

34 Daftar Anggota APPI

Dapatkan Souvenir menarik dari APPI bagi yang menuliskan artikel dalam majalah *Multifinance*. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai informasi ini, dapat menghubungi Sekretariat APPI di Telp. (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

Pemimpin Umum:
Suwandi Wiratno

Penanggung Jawab:
Sigit Sembodo
Rosalina Dhanudimuljo
Gusti Wira Susanto
Roni Haslim
Hafid Hadeli
Andreas Manik
Koji Hayakawa

Pemimpin Redaksi:
Sri Haryati

Sekretaris Redaksi:
Wellyani
Daniel Darmadi

Sirkulasi/Distribusi:
Sekretariat APPI

ALAMAT REDAKSI:
Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka)
Tower A Lantai 7 Unit D
email: sekretariat@ifsa.or.id
website: www.ifsa.or.id
Telp: 021-2982 0190
Fax: 021-2982 0191

Bantuan Likuiditas

Bantuan likuiditas melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah sangat diharapkan pelaku usaha jasa pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah korporasi yang salah satunya berkaitan dengan industri alat angkut dan otomotif sesuai dengan syarat yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.98/2020. Mohon informasi apakah sudah ada perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan dana tersebut dari perbankan?

Sutrisno Karim
Cilangkap, Jakarta Barat

Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai dengan saat ini Majalah Multifinance belum mendapatkan informasi atas pertanyaan Bapak, kami akan mencoba menyajikan informasi tersebut setelah data berhasil kami dapatkan, Red.

Omnibus Law

Situasi negara kita beberapa hari ini sempat di hebohkan dengan banyaknya demo dan pro kontra mengenai UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Mohon bantuan Majalah Multifinance untuk bisa menampilkan informasi dampak dari UU tersebut kepada industri pembiayaan, terima kasih

Matius Setya
Cilincing, Jakarta Utara

Terima kasih atas sarannya, Majalah Multifinance akan mempertimbangkan saran dari Bapak, terima kasih, Red.

Suwandi Wiratno,
Ketua Umum
Asosiasi Perusahaan
Pembiayaan Indonesia

Tetap Jeli di Kala Pandemi

Pandemi Covid-19 yang menjadi fenomena global itu menghantam perekonomian hampir seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perekonomian Indonesia pada kuartal kedua 2020 memang sempat minus hingga 5,2%. Sementara itu, pada kuartal III/2020 proyeksinya masih tetap minus dikisaran 2%-3%. Kendati minus, aktivitas masyarakat masih terlihat berjalan.

Penduduk Indonesia yang sebagian besar bekerja di sektor informal masih dapat mencari nafkah. Memang secara keseluruhan ada dampak dari pandemi ini, misalnya saja aktivitas transportasi jarak jauh lewat pesawat udara atau kereta api masih terbatas. Kegiatan pariwisata belum pulih 100%, kebiasaan masyarakat untuk berkumpul tidak dapat dilakukan.

Bagi perusahaan pembiayaan, belum pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat ini tentu menjadi satu tantangan tersendiri. Daya beli yang belum membaik ini, mau tidak mau membuat perusahaan pembiayaan harus menyesuaikan aktivitas usahanya.

Hanya saja, melihat geliat di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di kelompok mikro dan kecil yang tetap bergerak, rasanya menumbuhkan

keyakinan tersendiri bagi perusahaan pembiayaan.

Jika melihat situasi global yang masih lesu darah, sejatinya berjalan secara perlahan untuk melanjutkan usaha adalah pilihan paling nyata. Apalagi, OJK sudah menerbitkan sejumlah aturan yang memungkinkan perusahaan pembiayaan tetap melanjutkan aktivitas usaha di tengah pandemi ini.

Kondisi saat ini, perusahaan pembiayaan dituntut jeli menyusun strategi. Tentu kebiasaan lama di era sebelum pandemi, tidak bisa diadopsi sepenuhnya. Perlu pendekatan baru agar ceruk pasar yang bergerak terbatas saat pandemi ini, bisa digarap optimal.

Banyak cara bisa dilakukan di tengah pandemi. Memanfaatkan teknologi, tetap menjaga hubungan baik dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, membaca kebiasaan dan kebutuhan baru di masyarakat, mungkin bisa menjadi cara jitu agar bisnis pembiayaan tetap berjalan. Meningkatkan kolaborasi antar perusahaan pembiayaan juga bisa dilakukan agar layanan semakin meluas.

Jeli menjadi kata kunci. Jangan sampai, kiprah perusahaan pembiayaan yang sudah terbukti mampu memajukan ekonomi di negeri ini, terhenti karena pandemi. (*)

Manfaatkan Digitalisasi 4.0 untuk Peluang Pasar Industri Pembiayaan

Tujuh bulan telah berlalu sejak pandemi Covid-19 memasuki Indonesia. Jumlah korban terus bertambah, dan ekonomi masyarakat di kota dan daerah semakin terpuruk.

Selama pandemi, setiap pelaku usaha memiliki pilihan untuk memutuskan arah perusahaan. Tetap berdiam diri menunggu situasi kembali pulih, atau maju secara perlahan menghadapi kendala yang ada.

Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) mengatakan, perusahaan pembiayaan harus terus bergerak dan memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi situasi sulit saat ini.

Saat ini, lanjutnya, perusahaan pembiayaan tengah menghadapi banyak situasi yang rumit, mulai dari restrukturisasi, *reschedule* portofolio pembiayaan, dan menurunnya permintaan. "Jadi, pelaku usaha ikuti saja arahan regulator," tegasnya dalam acara Seminar Online *Multifinance Road to Recovery* pada Kamis (1/10/2020).

Suwandi mengimbau agar pelaku usaha mengikuti arahan dari regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas bisnis IKNB. OJK, lanjutnya, telah merilis dua aturan, POJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Aturan ini memuat langkah

pengendalian *risk management* dari kemungkinan terburuk yang terjadi terhadap industri.

Dalam membantu anggotanya dalam melakukan seleksi calon debitur, kami memanfaatkan teknologi untuk menekan risiko kredit. APPI dengan anak usahanya PT Rapi Utama Indonesia (Rapindo) membantu melakukan pengecekan *id card* melalui biometrik dan verifikasi nomor *handphone* untuk mengidentifikasi pemalsuan data diri calon debitur.

Pengecekan tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Rapindo ID Verification. Perusahaan dapat melakukan pemeriksaan data calon debitur lebih akurat dan dimulai dari awal proses pembiayaan.

Suwandi mengungkapkan, bisnis di industri pembiayaan masih memiliki ceruk pasar yang luas dan potensi yang besar dengan mengedepankan portofolio berkualitas. Hingga kini, sebanyak 70% masyarakat masih membeli mobil dan sepeda motor dengan menggunakan jasa dari perusahaan pembiayaan, sedangkan 30% sisanya dibeli dengan cara tunai.

Manfaatkan digitalisasi 4.0 untuk membantu proses bisnis. Ini bisa menjadi utopia dan distopia. Digitalisasi 4.0 bisa menjadi distopia bagi industri pembiayaan jika pelaku usaha tidak mampu mengelolanya dengan baik.

—**Suwandi Wiratno**

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan
Pembiayaan (APPI)

Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan perusahaan pembiayaan sangat dibutuhkan dan diperhitungkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas mereka.

Untuk memulai *recovery*, pelaku industri pembiayaan harus berkoordinasi dengan semua pihak dan *stakeholder* perusahaan, mulai bagian tertinggi hingga *level* terendah. “Manfaatkan digitalisasi 4.0 untuk membantu proses bisnis. Ini bisa menjadi utopia dan distopia. Digitalisasi 4.0 bisa menjadi distopia bagi industri pembiayaan jika pelaku usaha tidak mampu mengelolanya dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan mengatakan, industri keuangan di Indonesia mengalami tren negatif dan kontraksi, khususnya selama kuartal terakhir tahun ini.

Perlambatan ekonomi juga terjadi di semua negara di dunia. Di Indonesia, pemerintah membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Program ini bertujuan memberi stimulus, mendorong pertumbuhan investasi, mendukung kegiatan ekspor impor, dan penguatan subsidi dan bantuan sosial.

OJK mendukung stimulus yang disediakan oleh pemerintah yang menempatkan dana tersebut di lembaga perbankan, PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai lembaga penjamin kredit. Paket kebijakan ini diyakini dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi yang terjadi saat ini menggoncang pertumbuhan kredit perbankan. Kredit perbankan hanya mampu betumbuh kurang lebih 1% secara *year on year*.

Berdasarkan data OJK, pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan hingga Agustus -13% yoy dibandingkan dengan Agustus 2019 dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 5,23%. Prosentase NPF pada Agustus 2020 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,6%.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No.40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan LJKNB dan POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Deasease* bagi LJKNB.

Kebijakan ini bertujuan mengendalikan *NPF* dan restrukturisasi terhadap perusahaan pembiayaan. Regulasi ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan pembiayaan dalam merestrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi.

Artinya, kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan pembiayaan untuk mengambil langkah restrukturisasi terhadap bunga dari pendapatan atau *interest margin*, perpanjangan pembayaran, dan penundaan pembayaran oleh debitur.

Hingga akhir September 2020, sebanyak 182 perusahaan pembiayaan melaporkan adanya 5,2 juta kontrak yang masih dalam proses restrukturisasi. Total proposal restrukturisasi berjumlah Rp158,7 triliun, dan sebanyak 4,6 juta debitur telah disetujui untuk direstrukturisasi dengan total pokok hutang dan bunga sebesar Rp 170,17 triliun.

Ada banyak strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola bisnis di masa pandemi ini yakni *pertama*, perusahaan harus selalu memonitor kualitas pembayaran bagi debitur yang mengajukan restrukturisasi.

Kedua, menyempurnakan *collection* secara persuasif jika debitur mengalami masalah pembayaran.

Ketiga, menjaga hubungan baik dan mendapatkan kepercayaan perbankan sebagai sumber dana. Sebagai tambahan, pelaku usaha di industri pembiayaan menyesuaikan bisnis strategi, meninjau kembali kebutuhan bisnis untuk memahami pendapat pasar.

"Saya meyakini perusahaan pembiayaan akan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Namun, kita harus bisa menyoroti dan memaksimalkan peluang yang ada. *Recovery multifinance* adalah tantangan berat, tapi itu bukanlah lelucon yang mustahil. APPI dan anggotanya harus saling mendukung satu sama lain," tutur Bambang.

Penurunan Penjualan

Secara keseluruhan, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi menyebutkan, pandemi Covid-19 ikut mempengaruhi penjualan mobil dalam negeri. Industri kendaraan bermotor Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi atau penurunan yang tajam, yaitu di atas 50%, baik di sisi produksi, penjualan dan ekspor.

Menurut dia, industri kendaraan bermotor nasional membutuhkan waktu antara satu hingga dua tahun untuk tumbuh kembali. Sejak April hingga Agustus 2020, penjualan mobil bergerak fluktuatif.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan Juli 2020 sebesar 25.283 unit jika dibandingkan Juli 2019, maka turun 71,8%. Nangoi menuturkan, akibat pandemi ini Gaikindo menurunkan juga target penjualan dari 1.050 juta unit menjadi 600 ribu unit pada tahun ini.

"Saya telah berdiskusi dengan tim di Gaikindo, untuk mengatur ulang proyeksi tahun ini dengan angka yang lebih rasional dan akan bertengger di 400 ribu unit atau kurang dari itu," ujarnya.

Nangoi mengaku, pihaknya tengah menyusun proposal kepada pemerintah, yakni Kementerian Perindustrian guna meminta insentif di industri otomotif. Insentif

yang diusulkan tersebut adalah pemberian insentif atas besaran tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB 1) dan Pajak Kendaraan Bermotor kepada pemerintah untuk memberikan stimulus bagi industri otomotif.

Dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia 270 juta jiwa, Indonesia masih merupakan pasar terbesar yang dimiliki oleh prinsipal otomotif. Hanya rasio kepemilikan mobil per 1.000 penduduk di Indonesia masih jauh dibawah negara seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam.

Menurut Nangoi, hal ini disebabkan rendahnya pendapatan masyarakat per kapita dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Pulau Jawa masih menjadi pasar terbesar penjualan mobil.

Jika melihat sistem pembayaran pelanggan, sebanyak 70% pembeli masih menggunakan jasa pembiayaan untuk memiliki kendaraan, 30% sisanya membeli tunai. Pasar mobil terbesar itu masih didominasi segmen *medium dan low* dengan harga kurang dari Rp300 juta.

Gaikindo menargetkan penjualan mobil tahun 2021 bisa lebih baik dari tahun ini yaitu naik 29% menjadi 775ribu unit.

Saat ini, tidak ada satupun negara di ASEAN yang tidak terkena dampak dari penurunan penjualan akibat pandemi ini. Ketua Bidang

Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala mengakui, pasar sepeda motor di ASEAN masih didominasi oleh Indonesia dengan penjualan 2,15 juta unit *year to date* Juni 2020. Penjualan itu disusul Vietnam sebanyak 1,24 juta unit, Thailand sebanyak 869.002 unit, Filipina 564.311 unit, Malaysia 235.084 unit, dan Singapura 5.894 unit.

Sejak Januari hingga Agustus 2020, tren pasar sepeda motor dalam negeri mengalami penurunan secara fluktuatif. Terlebih, saat pandemi Covid-19 mulai menjadi isu sentral di Indonesia.

Data AISI menunjukkan, pada Juni 2020 penjualan sepeda motor mulai naik dengan angka 167.992 unit, naik lagi perlahan di Juli 2020 mencapai 292.205, dan Agustus sebanyak 317.107 unit disebabkan beberapa perusahaan mulai beroperasi dan pembiayaan mulai melayani *refinancing* sepeda motor.

“Pasar terkoreksi ketika mereka melakukan relaksasi kredit pada Maret 2020. Situasi ini berlanjut hingga April, di mana *market* terkoreksi sangat tajam mencapai 78% saat penerapan *lockdown* dilakukan terutama di Jakarta,” kata Sigit.

Sejumlah perusahaan pembiayaan berhenti beroperasi saat itu. Kondisi terparah terjadi pada Mei 2020 saat Pulau Jawa *lockdown*. Sejumlah perusahaan memutuskan untuk berhenti berproduksi.

Lesunya penjualan sepeda motor, tidak lepas dari pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif. AISI memprediksikan penjualan motor tahun 2020 akan berkisar di angka 3,6juta sampai dengan 3,7juta, dan tahun 2021 diprediksikan akan meningkat sekitar 11% di angka 4juta sampai dengan 4,3juta unit

Nangoi menilai, untuk menghadapi situasi saat ini pelaku usaha harus cermat memanfaatkan ruang digital dengan menciptakan berbagai program digital, seperti *digital marketing* dengan program *shopping from home*, *live sales event*, *virtual talkshow* untuk menjangkau komunitas, promosi, dan edukasi mengemudi virtual dengan mengedepankan *brand* dan penjualan.

Di lapangan, dia menambahkan, pelaku usaha harus cepat beradaptasi dengan kondisi

Pasar terkoreksi ketika mereka melakukan relaksasi kredit pada Maret 2020. Situasi ini berlanjut hingga April, di mana *market* terkoreksi sangat tajam mencapai 78% saat penerapan *lockdown* dilakukan terutama di Jakarta.

—Sigit Kumala,

Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

new normal untuk menerapkan protokol kesehatan di layanan penjualan, *services*, dan pengiriman barang.

Jika pandemi masih berlanjut hingga tahun depan, untuk penjualan sepeda motor domestik diproyeksi hanya 3,6 juta unit hingga 3,7 juta unit hingga akhir tahun 2020.

Kondisi yang menurun, juga terjadi bagi pelaku usaha alat berat. *Chief Marketing Officer* PT Trakindo Utama David Freddynanto mengungkapkan, penjualan alat berat diproyeksi turun sebesar lebih dari -40% hingga -50% pada tahun ini. Semua segmen alat berat seperti pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan kehutanan mengalami pertumbuhan negatif.

Pembiayaan alat berat pada tahun lalu secara keseluruhan mencapai Rp26,7 triliun, sedangkan per Agustus 2020 penjualan alat berat mencapai nilai Rp8,2 triliun.

Mayoritas penjualan alat berat berasal dari konstruksi yang berasal dari program nasional pemerintah yang dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha alat berat untuk hingga tahun depan.

Di aspek pertambangan, produksi batubara di Indonesia pada 2021 diperkirakan akan *flat* atau sedikit meningkat seiring permintaan batubara secara global pada 2021. Prediksi

ini dari asumsi tidak ada *lockdown* di negara importir besar seperti Cina dan India. Kemudian, harga batubara diperkirakan akan sedikit meningkat pada Kuartal IV 2020 dan berlanjut pada 2021.

Besarnya pasar alat berat di sektor pertambangan terkait dengan tren harga batubara, maka ukuran pasar pertambangan diperkirakan akan sedikit meningkat pada tahun 2021. Dengan demikian, permintaan alat berat di segmen pertambangan akan berada di angka 1.424 unit, atau naik 10% dibanding tahun ini (*year to date* Agustus 2020).

Untuk penjualan alat berat di segmen perkebunan, per Agustus 2020 hanya mencapai 1.309 unit. Peningkatan penjualan alat berat di segmen ini tergantung permintaan dari pelaku usaha yang bergerak di sektor kelapa sawit, tanaman pangan seperti padi, singkong, perikanan, peternakan, dan holtikultura.

Sementara, kontribusi permintaan alat berat dari sektor kehutanan ikut mengalami penurunan. Per Agustus 2020 penjualan alat berat dari sektor ini hanya mencapai 1,064 unit, sedangkan Desember 2019 sebanyak 1.305 unit.

Penjualan ini diprediksi sedikit meningkat pada tahun depan sebanyak 1.099 unit. Permintaan alat berat sektor kehutanan berasal dari perusahaan *pulp & paper*, *wood chips*, perkayuan, *furniture*, *plywood*, dan lainnya. (*)

Kalender Sertifikasi

JANUARI

01

FEBRUARI

02

MARET

03

APRIL

04

20 Januari:
SDM Online

22 Januari:
SAP & SDK Online
- Indonesia

10 Februari:
SDM Online

19 Februari:
SAP & SDK Online
- English

10 Maret:
SDM Online

26 Maret:
SAP & SDK Online -
Indonesia

14 April:
SDM Online

23 April:
SAP & SDK Online -
English

MEI

05

JUNI

06

JULI

07

AGUSTUS

08

28 Mei:
SAP & SDK Online -
Indonesia

16 Juni:
SDM Online

25 Juni:
SAP & SDK Online -
English

7 Juli:
SPP & SDM Jakarta

15 Juli:
SDM Online

23 Juli:
* SPP & SDM Semarang
* SAP & SDK Online -
Indonesia

9 Agustus:
SDM Online

13 Agustus:
SPP & SDM Jakarta

20 Agustus:
SPP & SDM Lampung

27 Agustus:
SAP & SDK Online - English

SEPTEMBER

09

OKTOBER

10

NOVEMBER

11

DESEMBER

12

15 September:
SDM Online

23 September:
SPP & SDM Surabaya

24 September:
SAP & SDK Online -
Indonesia

6 Oktober:
SPP & SDM Jakarta

8 Oktober:
SPP & SDM Medan

19 Oktober:
SDM Online

22 Oktober:
SAP & SDK Online -
English

3 November:
SPP & SDM Jakarta

11 November:
SDM Online

19 November:
SAP & SDK Online -
Indonesia

8 Desember:
SDM Online

17 Desember:
SAP & SDK Online -
English

Keterangan:

- SPP adalah Sertifikasi Profesi Penagihan
- SDM adalah Sertifikasi Dasar Manajerial

- SDK adalah Sertifikasi Dasar Komisaris
- SAP adalah Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)

OJK Yakin Perusahaan Pembiayaan *Rebound* Tahun Depan

JAKARTA — Lesunya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 membuat sejumlah kinerja perusahaan finansial, khususnya perusahaan pembiayaan menjadi tersendat. Namun, kondisi ini akan berbalik arah secara perlahan memasuki triwulan II/2021.

Hal itu disampaikan Kepala Departemen IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan Bambang W. Budiawan dalam wawancara bersama CNBC Indonesia pada 12 Oktober 2020.

OJK memperkirakan, memasuki April 2021, perusahaan pembiayaan akan menunjukkan kinerja positif meski bertumbuh di bawah 2%. Pertumbuhan perusahaan pembiayaan, lanjutnya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di awal triwulan II/2021, kinerja perusahaan pembiayaan akan *rebound* seiring dengan meningkatnya piutang pembiayaan. Hal ini ditandai dengan pembiayaan di segmen otomotif, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

yang telah direstrukturisasi dari sisi hulu dan hilir. Ini diharapkan dapat membuat perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan.

Dia meyakini, per Desember 2020, 88% perusahaan pembiayaan masih dalam tataran sehat dan cukup sehat. Namun, jika pandemi ini berlangsung lama, maka di akhir Maret 2021 komposisi perusahaan pembiayaan yang sehat akan berkurang menjadi 75%.

Bambang menambahkan, OJK berencana memperpanjang POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan ini dilanjutkan karena perusahaan pembiayaan selama ini melakukan restrukturisasi dari perbankan.

Kemudian, OJK juga telah memutuskan agar perusahaan pembiayaan tidak perlu membuat cadangan biaya untuk pelatihan kepada para karyawannya guna mengurangi beban *cost* perusahaan. (*)

Satgas Waspada Investasi Temukan 143 Usaha Gadai Ilegal Sejak 2019

JAKARTA — Satgas Waspada Investasi baru saja menemukan 50 usaha pergadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Dalam ketentuan POJK tersebut, seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada OJK dalam tenggat batas waktu dua tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli 2019.

Sebelumnya pada 2019, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 68 entitas gadai ilegal sehingga total sejak 2019 sampai Agustus 2020 menjadi 143 entitas gadai ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Luban Tobing mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK.

Selain 50 perusahaan gadai ilegal, hingga September 2020 Satgas dalam operasinya kembali menemukan 126 fintech *peer to peer lending* ilegal dan 32 entitas investasi.

Semua temuan Satgas Waspada Investasi ini identitasnya sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler.

Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas fintech *lending* ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. (*)

Penjagaan Arus Kas Jadi Tantangan Terbesar Perusahaan Pembiayaan

JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan pembiayaan saat ini adalah menjaga arus kas perusahaan selama masa pandemi.

Tantangan tersebut menjaga *cash flow* dan *collection* agar perusahaan dapat terus berjalan. Meski *buying power* saat ini tengah menurun, dengan menjaga *booking* yang bagus agar *cash flow* perusahaan tetap mampu bertahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Kendati demikian, lanjut Suwandi, perusahaan juga diharapkan membuat langkah inovatif pembiayaan dengan mengembangkan kapasitas finansial dan juga

peningkatan parameter manajemen risiko.

Suwandi menilai memang sudah semestinya seluruh perusahaan pembiayaan memiliki strategi mitigasi yang baik untuk dapat bertahan era pandemi ini.

Dengan situasi dan strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan saat ini, Suwandi optimistis bahwa industri pembiayaan dapat kembali stabil di tahun depan jika strategi yang dilakukan berjalan dengan efektif. (*)

Perusahaan Pembiayaan Bayar Obligasi

JAKARTA — Sejumlah perusahaan pembiayaan harus menyiapkan kas untuk melunasi obligasinya yang akan jatuh tempo menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan data Pefindo, terdapat 11 perusahaan pembiayaan yang harus melunasi obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN) yang akan jatuh tempo pada tiga bulan terakhir di tahun ini. Nilai total efek utang tersebut mencapai Rp7,8 triliun.

Dikutip dari Kontan, salah satu perusahaan pembiayaan itu ialah PT Federal International Finance (FIF). FIF baru saja membayar obligasi berkelanjutan III Tahap II tahun 2017 Seri B senilai Rp971 miliar. Surat utang itu memiliki tanggal jatuh tempo pada 10 Oktober 2020 kemarin.

Hugeng Gozali, Direktur Keuangan FIF mengatakan, pihaknya telah melunasi menggunakan dana internal hasil *collection*.

Seiring dengan pelunasan kewajiban ini, FIF juga merilis surat utang yang baru bertajuk

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 senilai Rp1,5 triliun di awal Oktober 2020. Dana ini nantinya akan digunakan sebagai modal kerja, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana yang ia sampaikan kepada Kontan pada 12 Oktober 2020.

Menurut dia, obligasi baru ini diterbitkan untuk pembiayaan baru. Dana hasil dari usaha (kolektibilitas) akan digunakan untuk membayar obligasi yang jatuh tempo.

Di lain pihak, PT BCA Finance memiliki Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri A senilai Rp842 miliar. Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim mengaku sudah ada dana untuk melunasinya sekitar Rp700 miliar dari deposito.

Perusahaan pembiayaan lain yang memiliki kewajiban pelunasan utang ialah PT Mandiri Tunas Finance (MTF). Pada Desember, MTF harus melunasi obligasi senilai Rp100 miliar.

Armendra mengaku tak khawatir dengan obligasi MTF yang akan jatuh tempo pada semester II/2020 ini. Dana obligasi baru itu, seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Direktur Keuangan MTF Armendra menyatakan, hingga saat ini kebutuhan likuiditas MTF masih terjaga, baik dari kegiatan *collection*, penjagaan kualitas portofolio, dan efisiensi. Dia berpendapat, obligasi berikutnya akan diproyeksikan pada tahun depan.

Berdasarkan informasi dari Bisnis.com, MTF menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp1 triliun di semester II/2020.

Direktur Keuangan MTF Armendra mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian ini, pihaknya berupaya mempertahankan posisi perusahaan tetap kuat, terutama dari sisi finansial, agar nasabah yang membutuhkan pemulihan ekonomi lewat pembiayaan, bisa terus terakomodasi.

MTF mendapatkan dukungan likuiditas dari induk usahanya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., lewat pendanaan bersama atau *joint financing* dengan persentase hingga 60%, sedangkan 40% sisanya didapatkan dari pemenuhan dana dari bank lain, *bilateral loan* dan emisi obligasi.

Secara terpisah, PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI Finance) yang tidak memiliki induk perbankan berupaya mendongkrak kinerja penyaluran pembiayaan pada semester II/2020. Untuk menopang likuiditasnya, salah satu langkah yang ditempuh yakni lewat penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Tahap III Tahun 2020 dengan nilai emisi mencapai Rp500 miliar.

Direktur Keuangan sekaligus Sekretaris Perusahaan BFI Finance Sudjono optimistis bahwa penerbitan obligasi ini akan kembali mendapat sambutan positif di pasar. Pasalnya, BFI Finance hingga saat ini masih terus mempertahankan rekam jejak yang dikenal baik oleh investor lewat kepastian pencadangan untuk memitigasi resiko. Nilai cadangan kerugian meningkat dari 2,0% di akhir 2019 menjadi 6,0% di akhir semester I/2020.

Meskipun terdapat peningkatan *Non Performing Financing* (NPF), BFI Finance tetap melakukan manajemen keuangan dan manajemen risiko yang berhati-hati. Pencadangan kerugian piutang telah ditingkatkan secara masif untuk mengantisipasi potensi kerugian piutang yang akan timbul di semester II/2020.

Sebelumnya, NPF perusahaan dengan kode emiten BFIN ini ini memang berada di angka 3,7% di akhir Juni 2020, meningkat dari kondisi normal NPF perusahaan dikisaran 1%. Namun ini masih lebih baik dari rata-rata NPF perusahaan pembiayaan per Mei 2020 dalam statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tercatat mencapai angka 4,1%.

Adapun surat utang yang akan diterbitkan BFI Finance merupakan babak baru obligasi berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp8 triliun yang telah disetujui OJK. Surat berharga ini ditawarkan dalam dua seri. Obligasi Seri A berjangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi dan obligasi seri B berjangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Masa penawaran awal obligasi berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 berlangsung pada 28 Juli hingga 12 Agustus 2020. Pembayaran dari investor dijadwalkan pada 7 September 2020 dan perseroan akan menerima dana hasil emisi obligasi ini pada 8 September 2020. (*)

PN Purwokerto Kabulkan Gugatan Batavia Prosperindo Finance Indonesia Cabang Purwokerto

PURWOKERTO – Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto mengabulkan gugatan perdata kasus jaminan fidusia PT Batavia Prosperindo Finance Indonesia Tbk. Cabang Purwokerto terhadap Sri Elina selaku tergugat.

Erlina terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur untuk membayar angsuran setelah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada 23 Desember 2019 sebagaimana dilansir dari laman radarbanyumas.co.id.

Objek Jaminan Fidusia tersebut berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga AV1414F tipe 2 (4x2) AT keluaran 2013 berwarna putih metalik.

Dwi, *Branch Manager* Batavia Prosperindo Finance Indonesia Cabang Purwokerto, menjelaskan, Erlina memiliki perjanjian kredit dengan pihaknya sebesar Rp92.140.500 dengan nilai penjaminan Rp123 juta. Berdasarkan catatan *history* pembayaran, tergugat tidak membayar angsuran selama enam kali, terhitung dari angsuran ke-4.

Dia mengaku, pihaknya telah melakukan melakukan penagihan berkali-kali dan melayangkan surat peringatan hingga tiga kali. Akan tetapi, tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan kewajibannya.

Menurut dia, selain surat peringatan, pihaknya juga telah meminta Sri Elina untuk datang ke Kantor Batavia Prosperindo Finance Indonesia Cabang Purwokerto, tapi debitur mengabaikan. Menyikapi kondisi itu, Batavia Prosperindo Finance Indonesia Cabang Purwokerto memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.

Dalam tuntutananya, Batavia Prosperindo Finance Indonesia Cabang Purwokerto mengalami total kerugian hingga Rp114.587.371.

Sidang putusan dilangsungkan pada 14 Oktober. Sidang yang dipimpin oleh Nanang Zulkarnain Faisal selaku hakim tunggal memutuskan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Dalam putusan itu, apabila tergugat tidak membayar kerugian yang diderita oleh penggugat dalam waktu yang telah ditentukan, maka tergugat harus menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut. Kemudian, tergugat harus membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp541.000.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat, tanpa dihadiri tergugat dan turut tergugat. (*)

iFinancing

Multifinance Core Systems Solutions

iFinancing business application is a total solution for multi finance industry.

OJK Purpose Loan : Investment, Working Capital, Multi Purpose and Others

Facility : Finance Lease, Consumer Finance, Factoring, Operating Lease and Fintech

Available : On Premise and Cloud Base Solution

Hubungi Kami

WA 0813 8777 7011 / Email cs@ims-tec.com

Berharap pada UU Cipta Kerja

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin sore (5/10/2020).

Melalui siaran di media sosial, masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana undang-undang Omnibus Law tersebut disetujui oleh sebagian besar fraksi di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan rapat penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja telah dilakukan sebanyak 64 kali rapat.

“Rinciannya ada dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja dan 6 kali rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi yang dilakukan hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari bahkan masa reses sebelumnya tetap melaksanakan rapat, baik di dalam maupun di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, Senin (5/10/2020).

Perlu untuk diketahui mengenai Omnibus Law. Omnibus Law atau dikenal dengan Omnibus Bill merupakan suatu UU yang dibuat untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa UU, sekaligus menjadi lebih sederhana.

Omnibus Law berkaitan dalam bidang ekonomi. Konsep kata ‘omnibus’ berasal dari Bahasa Latin, yang artinya ‘untuk semua’. Artinya, omnibus bersifat lintas sektor.

Mengenai RUU Cipta Kerja, adalah RUU yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Ada tiga hal yang disasar pemerintahan melalui Omnibus Law, yakni UU Perpajakan, Cipta Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Terdapat 74 UU yang akan terdampak Omnibus Law.

Lantas bagaimana dengan UU Cipta Kerja? UU ini merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

UU Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. RUU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi sejak awal pembahasan karena dianggap merugikan para pekerja/buruh dan hanya mementingkan pemberi kerja atau investor. Namun, dikutip dari *draft*, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata.

Sektor yang Diuntungkan

Menurut satu riset yang dikutip *Bisnis.com* pada Selasa (6/10/2020), menjelaskan bahwa ada sejumlah sektor yang diuntungkan dari adanya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja juga jadi angin segar untuk emiten-emiten dari sektor properti. Hal ini sejalan dengan adanya relaksasi kepemilikan oleh asing atas properti *high-rise* atau apartemen.

Adanya pajak yang lebih rendah untuk menjalankan bisnis mal juga menguntungkan sejumlah saham publik. Perubahan peraturan terkait tenaga kerja juga menguntungkan pengembang industri properti.

Sektor lain yang mendulang keuntungan juga ada sektor industri dasar. Dalam jangka menengah sektor ini berpotensi tumbuh dengan adanya kucuran modal asing yang masuk.

Sektor-sektor lain yang sedikit kecipratan dampak positif dari UU Cipta Kerja meliputi sektor agrobisnis, ritel, otomotif, farmasi, rumah sakit, dan telekomunikasi. Sektor perkebunan juga kena dampak positif pada sisi reformasi ketenagakerjaan.

Demikian juga sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dan Koperasi dari hulu hingga hilir diuntungkan dengan UU Cipta Kerja. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, akses pembiayaan yang akan paling berpengaruh dalam perkembangan UMKM. Teten mencontohkan akses kepada pembiayaan dipermudah, karena selama ini akses UMKM kepada perbankan masih 11%.

“Dalam UU Cipta Kerja, UMKM dipermudah untuk mengakses perbankan. Bahkan, kegiatan usaha itu bisa dijadikan agunan untuk memperoleh pembiayaan,” kata MenkopUMK.

Pelaku industri keuangan menyambut positif UU Cipta Kerja. Pasalnya, potensi geliat ekonomi dengan UU baru ini akan menjadi momentum pertumbuhan kredit.

Wakil Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala N. Mansyuri optimistis UU ini akan membuat geliat perekonomian menjadi jauh lebih baik. “Dengan begitu, kinerja perbankan yang memiliki fungsi intermediasi juga akan ikut membaik dengan bila ekonomi bergerak signifikan pula,” katanya seperti dikutip *Bisnis.com*, Kamis (8/10/2020).

Setali tiga uang, Presiden Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk. Herwidayatmo mengatakan bank adalah instansi yang fokus pada pengembangan dunia usaha. Jika dunia usahanya maju, lanjutnya, dengan sendirinya ekonominya maju, dan untuk mendukung pengembangan usaha, mereka pasti perlu hubungan dengan industri perbankan.

Saat ini, semua sektor usaha berharap dengan terbitnya UU Cipta Kerja, mengingat UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law merangkul ketentuan banyak bidang usaha. UU ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. (*)

Menteri Keuangan Tolak Usulan Pajak Mobil Baru 0%

JAKARTA — Pemerintah belum mempertimbangkan usulan dari Kementerian Perindustrian terkait dengan pemberian insentif berupa pengenaan pajak 0% untuk setiap pembelian mobil baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar pemaparan kinerja APBN sampai dengan September 2020 menjelaskan bahwa pilihan ini dilakukan karena pemerintah sedang fokus untuk mengoptimalkan paket insentif yang telah dikeluarkan untuk semua pelaku industri.

"Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru 0%. Kita mencoba untuk memberikan dukungan kepada sektor industri secara keseluruhan," kata Sri Mulyani, Senin (19/10/2020).

Pemerintah, dia menambahkan, telah mengeluarkan banyak insentif untuk menjaga daya saing industri nasional. Bahkan, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah juga terus mengevaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan insentif fiskal yang telah ditebar kepada semua kalangan usaha. "Sehingga

jangnan sampai, insentif di satu sisi yang kemudian memberikan dampak negatif pada perekonomian," tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan relaksasi pajak 0% untuk pembelian mobil baru.

Namun, usulan tersebut masih dalam tahapan awal untuk mendapatkan persetujuan banyak pihak sehingga masyarakat masih akan menunggu kepastian dari pemerintah yang bisa saja membutuhkan waktu yang lama.

Adapun komponen pajak kendaraan bermotor itu terdiri atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama (BBN).

Relaksasi pajak kendaraan bermotor baru diharapkan dapat menstimulasi pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di akhir 2020 sehingga bisnis otomotif terus bergerak, termasuk industri pendukung, seperti *dealership*, *finance*, asuransi, dan *spare parts*.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita mengatakan, upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diyakini

bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya yakni untuk memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi.

"Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai bulan Desember 2020," kata melalui siaran pers, Senin (14/9/2020).

Menurut Agus, kinerja industri otomotif pada semester I/2020 terbelang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini, lanjutnya, terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020, tapi pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di Tanah Air dan pemulihan ekonomi nasional.

Kepastian Industri

Menanggapi penolakan pemerintah memberi pajak 0% untuk mobil baru, *Head of Investor Relations* Astra International Tira Ardianti mengatakan, perseroan bisa menerima keputusan pemerintah. Informasi itu, menurutnya, juga sekaligus memberikan kepastian untuk industri.

"Walau industri tentunya menginginkan ada stimulus untuk meningkatkan pasar karena industri otomotif saat ini turun cukup besar," ujarnya seperti dikuti *Bisnis.com*, Selasa (20/10/2020).

Tira menjelaskan bahwa dampak terhadap penjualan diperkirakan terhadap kecepatan pemulihan pasar otomotif. Dengan kepastian itu, lanjutnya, pelanggan yang tadinya menunggu bisa mulai melakukan pembelian.

"Tentunya kami akan terus memberikan kemudahan bagi pelanggan agar dapat membantu mobilitas mereka," jelasnya.

Emiten berkode saham ASII itu menyatakan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Perseroan menyatakan secara konsisten meluncurkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren pasar seperti model *hybrid* baru-baru ini.

Berdasarkan laporan per September 2020, penjualan mobil di bawah Grup Astra mencapai 25.799 unit pada September 2020. Realisasi itu naik 53,81% dibandingkan dengan penjualan Agustus 2020 yang tercatat 16.773 unit.

Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

"Kami harapkan ada *tax deduction* untuk menstimulus daya beli, tapi *tax deduction* ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kita ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik," ungkapnya seperti dikutip *Bisnis.com*, Senin (14/9/2020).

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, yakni sebesar 15%-70% untuk kendaraan bermotor angkutan orang.

Besaran tarif tersebut disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder.

Saat kondisi pandemi Covid-19, membuat pelaku industri otomotif pesimistis target penjualan yang ditetapkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) hingga akhir tahun ini akan terpenuhi.

Gaikindo sebelumnya memprediksi bahwa pasar otomotif Indonesia akan terkoreksi lebih dari 40% dibandingkan dengan tahun lalu atau hanya menyentuh angka penjualan sebanyak 600.000 unit.

Namun, jika melihat realisasi penjualan hingga September 2020, target tersebut terasa sulit tercapai. Penjualan ritel kendaraan roda empat atau lebih di Indonesia diketahui baru menyentuh angka 407.396 unit pada September 2020.

Direktur *Marketing* PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa di tengah kondisi saat ini, banyak aspek yang pergerakannya sulit untuk diprediksi secara langsung. (*)

Chatib Basri: Ekonomi Nasional Diprediksi Normal Pada 2022

JAKARTA – Sampai dengan saat ini, ekonomi nasional masih mengalami turbulensi akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung berhenti. Ekonom senior Chatib Basri memproyeksikan, ekonomi RI baru akan kembali normal pada 2022 mendatang.

Basri mengatakan, ekonomi dalam negeri saat ini belum pulih dari tekanan Covid-19 dan ekonomi nasional masih bertahan dari krisis. Pemulihan ekonomi pun dapat terjadi jika pandemi corona mampu diatasi, dikutip dari CNN (21/10/2020)

Menurut dia, selama vaksin belum didistribusikan, maka otomatis protokol kesehatan masih akan diterapkan sehingga ekonomi masih sulit dipacu. Jika itu terjadi, lanjutnya, tahun depan masih akan menjadi tahun pemulihan

Selama kegiatan usaha masih harus menerapkan protokol kesehatan, ia tak melihat akan ada investasi dan ekspansi usaha. Dengan kondisi itu, pertumbuhan ekonomi normal di kisaran 5% baru akan terjadi pada 2022.

Meski investasi belum akan masuk dalam

jangka pendek, tapi dia menyebut itu bukan alasan bagi pemerintah untuk tak bersiap-siap.

Basri berpendapat, pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut yang tercermin dari keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperlebar defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dari 5,5% menjadi 5,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia menambahkan, pada tahun depan belanja negara masih menjadi tulang punggung perekonomian negara karena swasta masih berusaha bangkit dari keterpurukan.

Meski tak merinci proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2021, tetapi proyeksi Chatib berbeda dengan pemerintah yang optimis pada tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu mencapai level normal di kisaran 4,5% sampai 5,5%.

Hal ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (KEM PPKF RAPBN) 2021 yang disampaikan di Rapat Paripurna DPR. (*)

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Setahun Lagi

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Kebijakan memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi saat Rapat Dewan Komisioner OJK, 23 September 2020.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi.

“Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard* agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini,” ujarnya dalam rilis OJK, Kamis (22/10/2020).

Lembaga ini segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi dalam Peraturan OJK, termasuk memperpanjang beberapa

stimulus lanjutan yang terkait, seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, *governance* persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan *capital conservation buffer*, dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA), serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per 28 September 2020 tercatat sebesar Rp904,3 triliun untuk 7,5 juta debitur. Sementara NPL di September 2020 sebesar 3,15%, menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22%.

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam enam bulan terakhir menunjukkan kenaikan.

OJK senantiasa mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. (*)

ID Verification

CHECK IDENTITY & PHONE NUMBER

E-KYC SERVICES

FAKE ID CARD AND PHONE NUMBER ARE THREATS IN YOUR BUSINESS

SO, VERIFY YOUR PROSPECTIVE CUSTOMER SINCE BEGINNING OF PROCESS

- There is no Rapindo's member data shared to third-party for this purpose.
- Rapindo do not keep data which is entered by member on ID Verification System.

FEATURES

1. ID Card Verification Basic
2. ID Card Verification Pro
3. Phone Number Verification
4. Phone Number Verification Extra
5. Phone Number Verification Activation Check

ADVANTAGE

1. Offer good price without bulk buying upfront
2. Buy as your business needs or growth
3. Manage your usage per user per feature
4. Manage your usage per user per feature

PT. Rapi Utama Indonesia
Kota Kasablanka Tower A Lantai 7 Unit D
Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 1287
T. 021 2283 6019
E. info@rapindo.co.id

Perkembangan Bisnis Pembiayaan Syariah Masih Tak Semulus Konvensional

Perkembangan bisnis industri pembiayaan berbasis syariah di Indonesia tidak semulus industri sejenis berbasis konvensional, apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum membaik.

Kinerja industri pembiayaan berbasis syariah ini dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan karena beberapa faktor, di antaranya pelaku usaha sektor tersebut sedang melakukan konsolidasi. Tercatat penyaluran pembiayaan berbasis syariah nasional pada 2019, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencapai Rp15,92 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 18% apabila dibandingkan dengan akhir 2018 yang terdata senilai Rp19,47 triliun.

Data statistik OJK menunjukkan realisasi pembiayaan berprinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan justru menyusut hingga 18% secara tahunan (*year-on-year/yoY*) sepanjang 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan bisnis di segmen konvensional.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengakui bahwa kondisi tersebut memang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. "Kan memang turun terus, ada beberapa sebabnya, yakni pertama pelaku usaha pembiayaan syariah yang sedang melakukan konsolidasi," ujarnya.

Selain adanya konsolidasi internal dan eksternal di industri pembiayaan syariah, industri sektor tersebut juga sedang menunggu regulasi atau peraturan OJK, tentang kejelasan apakah unit usaha syariah harus melakukan *spin off* atau tidak.

Selain itu, likuiditas dari bank syariah ke perusahaan pembiayaan pun masih ketat. Faktor-faktor inilah yang dinilai memicu penyaluran pembiayaan syariah kepada masyarakat terus mengalami penurunan.

Suwandi menyatakan bahwa saat ini ada tiga perusahaan pembiayaan murni syariah, yaitu Amanah Finance, Al-Ijarah Finance, dan Citifin Finance, sedangkan dari unit usaha syariah ada 40 perusahaan pembiayaan. "Memang pelaku syariah ini sempat mendengar tidak perlu *spin-off*, tapi sampai sekarang tidak ada POJK-nya. Jadi, pelaku menunggu itu, agar tidak ragu lagi apakah perlu membuat perusahaan terbuka atau PT baru atau tidak," tuturnya.

Adapun, pendorong utama penyusutan pembiayaan syariah 2019 adalah dari penurunan pembiayaan jasa syariah sebesar 46,67% dan pembiayaan jual beli syariah.

Potensi Bertumbuh

Namun demikian, berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia yang dirilis OJK pada September 2020 menyebutkan, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian nasional.

Total aset IKNB syariah meningkat 8,70% secara tahunan (*year on year/yoy*) menjadi sebesar Rp 105,56 triliun pada 2019. Kinerja positif itu diharapkan bisa membuat IKNB syariah turut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

Selain perbankan syariah dan pasar modal syariah, juga terdapat industri keuangan syariah lainnya yang memiliki keragaman pada pelaku usahanya, yaitu Industri IKNB syariah. "Dengan terus bertumbuhnya aset serta jumlah entitas IKNB Syariah, diharapkan IKNB Syariah dapat menjadi salah satu pilar kekuatan dalam menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia."

Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, industri keuangan syariah Indonesia telah mewarnai industri keuangan nasional lebih dari dua dekade melewati berbagai dinamika perekonomian nasional. "Patut disyukuri, industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif," katanya dalam kata sambutan laporan tersebut.

Sampai dengan Desember 2019, aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 1.468,07 triliun dengan pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 9,01% dari aset keuangan nasional.

Wimboh menjelaskan bahwa Indonesia juga semakin mengukuhkan posisinya dalam ekonomi dan keuangan syariah global. Indonesia meraih peringkat pertama dalam *Global Islamic Finance Report 2019*, naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di lingkup ekonomi syariah, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*. Pengembangan keuangan syariah

Memang pelaku syariah ini sempat mendengar tidak perlu *spin-off*, tapi sampai sekarang tidak ada POJK-nya. Jadi, pelaku menunggu itu, agar tidak ragu lagi apakah perlu membuat perusahaan terbuka atau PT baru atau tidak.

—**Suwandi Wiratno**,
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan
Pembiayaan Indonesia (APPI)

menjadi salah satu faktor pendorong naiknya peringkat Indonesia.

Menurut Wimboh, pencapaian tersebut merupakan hasil dari dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik dari pemerintah, otoritas, pelaku jasa keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam, maupun sektor religius. Sinergi dan integrasi semua elemen dalam ekosistem ini sangat diperlukan dalam mendukung akselerasi pengembangan keuangan syariah.

Sementara itu, dalam rincian laporan tersebut, setidaknya sembilan dari 12 aset industri industri IKNB syariah pada akhir tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan positif. Porsi aset terbesar disumbangkan aset dari industri perasuransian syariah mencapai Rp 45,45 triliun, tumbuh sebesar 8,32% (yoy).

Nilai tersebut mencakup pertumbuhan positif dari perusahaan asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah. Selain aset, pertumbuhan juga diikuti total investasi dan kontribusi bruto asuransi syariah.

Kemudian, perusahaan modal ventura syariah juga tercatat melonjak 114,09% (yoy) menjadi sebesar Rp 2,73 triliun. Catatan positif itu diikuti penurunan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 6,3% dari tahun sebelumnya.

Capaian positif turut dicatatkan aset perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah turut naik sebesar 93,22% (yoy) menjadi sebesar Rp 4,44 triliun. Begitu juga pertumbuhan positif sebesar 17,26% (yoy) yang dicatatkan aset perusahaan dana pensiun syariah menjadi Rp 3,97 triliun.

Hal itu dipengaruhi penambahan entitas baru hasil konversi dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) konvensional, menjadi DPPK syariah. Selain itu, penambahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang melanjutkan paket investasi syariah.

Selanjutnya, aset perusahaan penjaminan syariah pun tumbuh 61,70% (yoy) menjadi sebesar Rp 2,22 triliun. Adapun perusahaan pergadaian syariah secara nominal tumbuh cukup signifikan sebesar 44,58% (yoy), atau menjadi Rp 11,25 triliun. Pertumbuhan juga

Patut disyukuri, industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif.

—Wimboh Santoso,
Ketua Dewan Komisiner OJK

ditorehkan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 44,96% (yoy) menjadi Rp 403 miliar.

Adapun penurunan aset dicatatkan oleh perusahaan pembiayaan syariah sebesar 9,75% (yoy) menjadi Rp20,01 triliun. Penurunan itu dipengaruhi piutang pembiayaan yang mengalami kontraksi sebesar 17,15% (yoy) di 2019.

“Seiring dengan terus menurunnya jumlah entitas perusahaan pembiayaan syariah dalam empat tahun terakhir, terbatasnya pendanaan, dan kurang berkembangnya variasi produk perusahaan pembiayaan syariah,” tulisan laporan tersebut.

Penurunan aset juga ditorehkan aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) syariah yang berkontraksi sebesar 8,71% (yoy) menjadi Rp 13,38 triliun. Untuk aset perusahaan pembiayaan sekunder perumahan syariah turut menurun 12,43% (yoy) menjadi sebesar Rp 1,67 triliun.

Dengan total aset sebesar Rp 105 triliun, IKNB syariah memiliki pangsa pasar sebesar 4,15%. Adapun total aset IKNB mencapai Rp 2.542,72 triliun. Selain mengalami kenaikan aset, IKNB syariah juga mengalami kenaikan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan.

Di akhir tahun 2019 tercatat jumlah entitas IKNB Syariah sebanyak 197 institusi, yang terdiri dari 105 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh (*full fledged*) dan 92 unit usaha syariah. Penambahan jumlah entitas terbanyak pada industri LKM Syariah dari yang awalnya berjumlah 59 lembaga di tahun 2018 menjadi 75 lembaga di tahun 2019. (*)

1. FKD NTB

Pertemuan Bulanan FKD NTB pada tanggal 21 September 2020, sekaligus membahas kerjasama dengan Krimum Polda NTB dalam melaksanakan eksekusi.

2. FKD Aceh

Pada tanggal 21 September 2020, FKD Aceh melaksanakan pertemuan bulanan dengan anggotanya.

3. FKD Batam

Pertemuan bulanan FKD Batam dihadiri perwakilan Diskrimsus Polda Kepri pada tanggal 24 September 2020.

4. FKD NTB

Pertemuan anggota FKD NTB bersama Kasubdit 3 beserta Kanit Buser Krimum Polda NTB pada tanggal 24 September 2020 dalam pembahasan proses eksekusi supaya berjalan dengan aman dan nyaman sehingga meminimalkan laporan dari pihak nasabah atau pihak ke tiga terhadap perusahaan pembiayaan.

APPI Dorong Semangat Berprestasi dengan Pemberian Beasiswa

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) selalu berupaya mendukung dunia pendidikan, karena kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang sangat banyak. Pada tahun ini, APPI kembali memberikan beasiswa kepada anak bangsa yang

berprestasi. Mereka yang mendapat beasiswa merupakan karyawan dan anak-anak karyawan dari perusahaan pembiayaan anggota APPI.

Berikut ini adalah nama-nama pemenang beasiswa SMA dan perguruan tinggi untuk tahun 2020. (*)

BEASISWA SMA

Nama Perusahaan	Nama Karyawan	Nama Anak
Adira Dinamika Multi Finance	Adi Rachmad	Shafiyah Putri Adini
Armada Finance	Yeni Setiawati	Velda Christabella Wijaya
Bima Multifinance	Mohamad Tafsir	Alvira Damayanti
Bussan Auto Finance	Benedictus Joko Winarno	Meilina Candra Dewi
Mega Auto Finance	Perhendra	Fathurrahman
Mega Finance	Pepen Supendi	Baynica Revi Septiara

BEASISWA PERGURUAN TINGGI

Nama Perusahaan	Nama Karyawan	Nama Anak
Astra Credit Companies	Miftaqodim	Angelia Dwi Ananda
BCA Finance	Adi Darmawan	Natasha Aurellia Darmawan
Federal International Finance	Nurkolis	Aulia Chairunnisa
Indosurya Inti Finance		Nadia Nur Indah Fajrina
Mandiri Tunas Finance	Elza Riani Fitri	Naufal Rais Sahasika
Wahana Ottomitra Multiartha	Handy Siswandi	Yunanda Aura Apricila

AB SINAR MAS MULTIFINANCE
Sinar Mas Land Plaza Tower 1 Lt 9,
Jl. MH Thamrin Kav. 22/51,
Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350
Tlp: 392 5660 Fax 392 5788

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
Millennium Centennial Center Lt 56
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 25, RT. 4/RW.2,
Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Tlp: 39733232, 39733322
Fax: 39734949

ADICIPTA INOVASI TEKNOLOGI
Graha Adicipta Jl. Kebon Jeruk Raya No. 80
Jakarta Barat 11530
Tlp: 53673030

ADITAMA FINANCE
Plaza Bank Index, 8th Floor
Jl. M. H. Thamrin Kav. 57,
Jakarta Pusat
Tlp: 31931006 Fax: 31931016

AEON CREDIT SERVICE

AEON CREDIT SERVICE INDONESIA
3A Plaza Kuningan South Tower,
Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Jakarta 12940
Tlp: 252 3331 Fax: 5288 0232 / 0231

AKULAKU FINANCE INDONESIA
Gedung Sahid Sudirman Center Lt.18 Unit H
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220
Tlp: 50818930

AL UJARAH INDONESIA FINANCE
Menara Palma Lt. 25
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 kav 6
Kuningan Jakarta 12950
Telp 021-57957552 / 7553 Fax 021-57957507

AMANAH FINANCE
Wisma Kalla Building Lt.3
Jl. Dr. Sam Ratulangi No.8
Makassar 90132
Telp: 0411 – 853210

ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE
Gading River View Blok H 56 B,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tlp: 45869941

ANDALAN FINANCE INDONESIA
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3
BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321
Tlp: 021-22356888 Fax: 021-22356899

ANUGERAH UTAMA MULTIFINANCE
Plaza ABDA Lt.6
Jl. Jend Sudirman Kav 59 Jakarta 12190
Tlp: 514 02228 Fax: 514 02224

ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE
Jl. Raden Tumenggung Suryo No. 28
Malang, Jawa Timur 65123
Tlp: 0341-491222 Fax: 0341-470079

ARMADA FINANCE
Jl. Jend. Sudirman No. 165, Magelang 56125
Tlp: (0293) 313777 Fax: (0293) 313888
Website: www.armada-finance.co.id

ARTHA PRIMA FINANCE
Grand Slipi Tower Lantai 32,
Jl. S. Parman Kav. 22-24 Slipi
Jakarta Barat 11480, Tlp: 2902 2071/72
Fax: 2902 2085, Website: www.arthaprima.co.id

ARTHAASIA FINANCE
Gedung Kencana Tower Lantai 5-6
Business Park Kebon Jeruk
Jl. Meruya Iir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620,
Telp. 021. 58908189 atau 021. 58908190
Fax. 021. 58908146

ASIA MULTIDANA
Jl. Pluit Indah Raya No. 31
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Tlp: 22673031 / 22673038

ASIATIC SEJAHTERA FINANCE
Ruko Karawaci Office Park Excelis 51, Lippo Karawaci,
Tangerang 15810
Tlp: 5510200 Fax: 5510898

ASLI RANCANGAN INDONESIA
Senayan Business Center
Jl. Senayan No.39 Rawa Barat, Jakarta 12180
Tlp: 22775752 / 22775752

ASTRA AUTO FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220, 788 51198
Website: www.autocybercenter.com

ASTRA MULTI FINANCE
Menara FIF, Lt.7
Jl. TB. Simatupang Kav.15
Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12440
Tlp: 769 8899 Fax: 769 8811
www.fifgroup.co.id

ASTRA SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220, 788 51198
Website: www.autocybercenter.com

ASTRIDO PACIFIC FINANCE
Toyota Building 3rd Floor, Jl. Balikpapan Raya No. 7,
Jakarta 10160, Tlp. 231 2220, 231 2221
Fax: 231 0053/345 1334
Website: www.astrido-finance.co.id

BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO
Komp. Ruko Wolter Monginsidi
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 N
Jakarta Selatan
Tlp: 719 6488 Fax: 719 6489

BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
Gedung Chase Plaza Lt. 12,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Tlp: 520 0434 Fax: 520 9160

BCA FINANCE
Wisma BCA Pondok Indah Lt.8, Jl. Metro Pondok Indah
Sektor I-S Kav. No. 10, Jakarta Selatan 12310
Tlp: 299 73100 Fax: 29973232/33

BCA MULTI FINANCE
Gedung WTC Mangga Dua Lantai 6 Blok CL 001
Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta Utara 14430
Tlp: 29648200

BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE
Hermina Tower Kav Blok B/10, Lantai 15,
Jalan HBR Motik No.4, RW 10, Gunung Sahari Selatan,
Kemayoran, Jakarta 10720
Tlp: 39700400

BETA INTI MULTIFINANCE
Ruko The Greencourt Blok D08
Jl. Boulevard Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Tlp: 5309331 Fax: 5363549

BFI FINANCE INDONESIA
BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang
Tlp: 296 50300 Fax: 296 60757
www.bfi.co.id

BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE
Jl. Balikpapan Raya No. 24 Lt. Dasar,
Jakarta Pusat 10130
Tlp: 632 1111 Fax: 631 8555

BIMA MULTI FINANCE
Jl. Cideng Barat No. 471, Jakarta Pusat
Tlp: 638 58555 Fax: 638 58001

BINTANG MANDIRI FINANCE
Graha Bintang Cikini,
Jl. Cikini Raya No 55, Menteng, Jakarta Pusat
Tlp: 3983 0391 Fax: 3192 4731/32

BNI MULTIFINANCE
Gedung BNI Life Insurance Lt. 5
Jl. Aipda KS Tubun No. 67
Jakarta Pusat 10260
Tlp: 290 22555 Fax: 290 22146

BOSOWA MULTI FINANCE
Menara Global Lt. 21
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 27
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 5275230

BRINGIN INDOTAMA SEJAHTERA FINANCE
Hayam Wuruk Plaza 3rd Floor,
Jl. Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat 11160
Tlp: 649 8218 Fax: 649 8235

BRINGIN SRIKANDI FINANCE
Synthesis Tower Building II, 11th Floor,
Jl. Gatot Subroto 177 A Kav. 64, Jakarta 12870
Tlp: 837 94610 Fax: 837 94609

BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)
Lippo Kuningan Lantai 11 dan GF
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12
Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Tlp: 5745333 Fax: 5745444

BUANA FINANCE
Tokopedia Tower
Ciputra World 2 Lt 38, Unit A - F
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta 12950
Tlp: 50806969 Fax: 50806996

BUANA SEJAHTERA MULTIDANA
Belleza Office Tower Lt. 12
Jl. Letjend Soepeno No 34 Arteri Permata Hijau,
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Tlp: 29022050-60 Fax: 29022070

BUKOPIN FINANCE
Gd. Bank Bukopin Lt. 3
Jl. Melawai Raya No. 66, Jakarta Selatan 12160,
Tlp: 726 0756, 724 5014 Fax: 726 0865

BUMIPUTERA - BOT FINANCE
Wisma Bumiputera, 11th & 12th Floors,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Tlp: 570 6762, 522 4522 Fax: 525 561

BUSSAN AUTO FINANCE
BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
Tlp: 29396000 Fax: 29396100

CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE
Jl. Raya Kelapa Dua Ruko Blitz 2 Blok C No.17-19,
Paramount Serpong, Kel. Kelapa Dua, Tangerang 15810
Tlp: 22229200, 22229449

CAPELLA MULTIDANA
Jl. Sunter Paradise Timur Raya Blok G2 No. 4-5
Jakarta Utara
Tlp: 640 1001 Fax: 640 1003

CATERPILLAR FINANCE INDONESIA
Beltway Office Park Tower C
Level 3 unit #301-303, Jl. TB Simatupang No. 41
Jakarta Selatan 12550
Tlp: 29392999 Fax: 7804415

CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE
Wisma 77, Tower 1, Lantai 20
Jl. Letjend S. Parman Kav. 77, Slipi
Jakarta Barat 11410
Tlp: 29775800

CENTRAL JAVA POWER
Summitas Tower 1 Lt. 15,
Jl. Jend Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190
Tlp: 520 5041 Fax: 520 2474

CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA
Menara Astra Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav.5 Jakarta 10220
Tlp: 30404080 Fax: 30404081

CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
Gedung TMT 1 Lt.6,
Jl. Cilandak KKO Raya No. 1 Jakarta 12560
Tlp: 299 76650 Fax: 299 76651
www.csulfinance.com

CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Jalan Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15
Bintaro Jaya Sektor IX,
Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15229
Telp. (021) 2788-1800

CIPTADANA MULTIFINANCE
Plaza ASIA, Office Park 2-3,
Jl. Jend Sudirman Kav 59, Jakarta 12190
Tlp: 255 74800 Fax: 255 74900, 514 01020

CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH
Jl.R.S. Fatmawati No.29, Jakarta Selatan 12430
Telp : 021-7650222, 7662044 Fax : 021-7661337

CLEMONT FINANCE INDONESIA
Wisma Korindo 2nd Floor,
Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780
Tlp: 797 6363 Fax: 797 6371, 797 6368
www.clemontfinance.co.id

CLIPAN FINANCE INDONESIA
Gedung Wisma Slipi Lt. 6, Jl. Letjen. S. Parman
Kav. 12, Jakarta Barat 11480
Tlp: 530 8005 Fax: 530 8026/27
Website: www.clipan.com

COMMERCE FINANCE
Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 28, Tower A
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6,
Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80864285

DAINDO INTERNASIONAL FINANCE
Jl. KH Hasyim Ashari No. 35A Lt. 5
Jakarta Pusat 10150
Tlp: 6323308 Fax: 6323307

DANAREKSA FINANCE
Gedung Plaza BP Jamsostek Lt. 12
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta 12910
Tlp: 29555777 Fax: 3522495

DANASUPRA ERAPACIFIC
Tower C Lantai 5, 18 Parc Place, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp: 51401157 Fax: 51401159

DANA UNICO FINANCE
Gedung Dana Paint Lt.2, Jl. Pemuda Ujung,
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
Tlp: 29847799 Fax: 29834903

DAYA SEMBADA FINANCE
Wisma Argo Manunggal 8th Fl,
Jl. Gatot Subroto, Kav. 22, Jakarta Selatan 12930
Tlp: 252 2772, 252 2662 Fax: 252 5402

DIPO STAR FINANCE
Sentral Senayan II Lt.3, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta
Tlp: 579 54100 Fax: 579 74567

EBIZ CIPTA SOLUSI
Metropolitan Tower Lt. 13 Unit E,
Jl. RA Kartini Kav. 14, Jakarta 12430
Tlp: 29182939 Fax: 29182941

EMPEROR FINANCE INDONESIA
Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930
Tlp: 29660826 Fax: 29660816

EQUITY FINANCE INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk Lt. 8, Jl. Hayam wuruk No.8 Kel.
Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120
Tlp: 80632888

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
Menara FIF, Jl TB Simatupang Kav. 15
Cilandak Barat, Jakarta 12430
Tlp: 769 8899 Fax: 7590 5599
Website: www.fifgroup.co.id

FINACCEL FINANCE INDONESIA
Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260
Telp: 021-22055677

FORTUNA MULTI FINANCE
Jalan Sultan Syahri Abdurahman No. 1A
Gedung Aneka Paviliun Lt.5, Pontianak
Tlp: Fax:

FUJI FINANCE INDONESIA
Menara Sudirman Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190
Tlp: 5226509 Fax: 5226517

GENIE MULTI FINANCE
Sampoerna Strategic Square Level 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12930
Tlp: Fax:

GLOBALINDO MULTI FINANCE
Gedung Victoria Lantai 3 Unit 305
Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51
Jakarta Selatan
Tlp: 7396949

GROUP LEASE FINANCE INDONESIA
Jl. Cideng Barat No. 23B
RT/RW 12/01, Cideng, Gambir
Jakarta Pusat 10140
Tlp: 6312194 Fax: 22636302

HASJRAT MULTIFINANCE
Jl. R.P. Soeroso 38, Jakarta 10350
Tlp: 390 5912-14, 390 0719. Fax: 314 0609, 390 4114

HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA
Prudential Centre, Kota Casablanca
Level 9, unit A-H. Jl. Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan 12870. Tlp: 29639999

HEXA FINANCE INDONESIA
Ged. Atrium Mulia, Lt. 2 Suite 205,
Jl. HR Rasuna Said Kav. B 10-11
Jakarta Selatan 12910
Tlp: 29039510 Fax: 29039511

HITACHI CAPITAL FINANCE INDONESIA
Atria@Sudirman 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
Tlp: 5739339 Fax: 5739949

HINO FINANCE INDONESIA
Indomobil Tower Lt. 17, Jl. MT. Haryono Kav. 11
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
Tlp: 29827960 Fax: 29827961

HOME CREDIT INDONESIA
Plaza Oleos Lantai 8 & 9 Jl. TB. Simatupang
No. 53A. Jakarta 12520, Indonesia
Telp: +62 21 295 39655 Fax: +62 21 227 80155

IFS CAPITAL INDONESIA
Rukan Cordoba Blok G No. 37
Jl. Marina Raya – Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
Tlp: 22573029 Fax:

an Indocyber company

INDOCYBER GLOBAL TEKNOLOGI
Sampoerna Strategic Square, South Tower
Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
Tlp: 5663705 Fax: 5663704

INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE
Gedung Office 8 Lt.16 Unit G, Jl. Jend Sudirman
Kav. 52-53, Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 2933 3811 Fax: 2933 3810

INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

Indomobil Tower Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Tlp: 29185400 Fax: 29185401

INDOSURYA INTI FINANCE

Indosurya Center 10th Floor
Jl. M. H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat 10110
Tlp: 3890 9021 Fax: 3890 0102

INOVASI MITRA SEJATI

Jl. Cideng Timur Raya No. 86A
Jakarta Pusat 10160
Tlp: 3456852 Fax: 3456934

INTAN BARUPRANA FINANCE

INTA Building 1st Fl
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta 14130
Tlp: 440 1408 Fax: 440 8441

INTENSIF MULTI FINANCE

Gedung Granadi Lt. 6 Sayap Selatan
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Blok X 1
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Tlp: 2523752 Fax: 29410482

INTI ARTHA MULTIFINANCE

Grand Slipi Tower Lt. 11.
Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480
Tlp: 29865829/39 Fax: 29865837

INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE

Gunung Sahari Raya Komp. Ruko Mangga Dua Square
Blok E. 19-20, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14430
Tlp: 6251900 Fax: 6252900

ISID INDONESIA

Menara Sentraya Lt. 17
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A
Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Tlp: 27881993 Fax: 27881994

ITC AUTO MULTI FINANCE

Lantai 21 Gama Tower, Jl. HR Rasuna Said Kavling C 22,
Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Tlp: 22057027 Fax: 22057045

JACCIS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE

Lippo Kuningan 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.
B-12 Kuningan, Jakarta 12940
Tlp: 2971 0100 Fax: 2911 0313

JELAS KARYA WASANTARA (VERI JELAS)

Jl. Bangka Raya No. 21, Pela Mampang
Jakarta Selatan 12720
Tlp: 22718620

JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE

Jl. Pecenongan Raya No. 45,
Jakarta Pusat 10120
Tlp: 352 2238 Fax: 384 2104

KARYA TEKNIK MULTIFINANCE

Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta 11230
Tlp: 691 0382 Fax: 691 6267

KARUNIA MULTIFINANCE

Graha Anabatic Lt. 10, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2,
Summarecon Serpong, Tangerang 15811
Tlp: 80636000 Fax: 80636001

KB FINANSIA MULTI FINANCE

SCBD LOT 28 OFFICE 8 Lt. 15,
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53, JAKARTA 12190,
TLP: 2933 3646 FAX: 2933 3648
WEBSITE: WWW.FINANSIA.COM

KOEXIM MANDIRI FINANCE

Menara Mulia Suite 2007,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta 12930
Tlp: 525 7261 Fax: 525 7260

KOMATSU ASTRA FINANCE

United Tractors Head Office Wing Area 6th Floor,
Jalan Raya Bekasi KM 22
Jakarta 13910
Tlp: 4605948 Fax: 4605954

KRESNA REKSA FINANCE

Plaza ABDA Lantai 28,
Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta Pusat 12190
Tlp: 514 01725-27 Fax: 514 01728

LOTTE CAPITAL INDONESIA

Wisma Keiai 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.3, Jakarta
Tlp: 572 4255 Fax: 572 4256

MANDALA MULTI FINANCE

Jl. Menteng Raya No. 24 A-B
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2925 9955 Fax: 2925 9961
Website: www.mandalafinance.com

MANDIRI FINANCE INDONESIA

WISMA AMG, Jl. RS Fatmawati No. 29
Jakarta Selatan 12430
Telp: 750 9165 Fax: 750 9163
Website: www.mandirifinance.com

MANDIRI TUNAS FINANCE

Graha Mandiri Lantai 3A,
Jl. Iman Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Tlp: 230 5608 Fax: 230 5618
Website: www.mtf.co.id

MANDIRI UTAMA FINANCE

Plaza BAPINDO Menara Mandiri Lantai 26-27,
Jl. Jend Sudirman Kav.54-55 Jakarta Selatan
Tlp: 5278038 Fax: 5278039

MAYBANK INDONESIA FINANCE
Gd. Wisma Eka Jiwa Lt.10,
Jl. Mangga Dua raya, Jakarta Pusat 10730
Tlp: 623 00088 Fax: 623 00099

MAXIMA INTI FINANCE

Karawaci Office Park Blok A9,
Lippo Karawaci Tangerang 15811
Tlp: 5533555 Fax: 5535171

MEGA FINADANA FINANCE

Jl. Abdul Muis No. 46 Lantai 3, Jakarta Pusat 10160
Tlp: 348 35325 Fax: 345 9559

MEGA FINANCE

Jl. Wijaya I No. 19 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12170
Tlp: 728 00818 Fax: 728 00978

MEGA AUTO FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627/28 Fax: 536 66697/98

MEGA CENTRAL FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi,
Jakarta Barat 11410
Tlp: 536 66627, 536 66628 Fax: 536 66698

MITRA DANA TOP FINANCE

Gedung Top Center
Jl. KH Hasyim Ashari No. 13-13A Jakarta Pusat.
Tlp: 638 66017/18 Fax: 021-6307273

MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE INDONESIA

Mid Plaza 2 Building, lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta 10220
Telp. 573 5905 Fax. 573 5906

MITRA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE

Gedung Graha Deka
Jl. Raya Kranggan No.120 RT 03 RW 006,
Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sumpurna,
Bekasi, Jawa Barat
Tlp: Tlp: 84596099 Fax:

MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA

Plaza Bank Index Lt. 11. Jl. MH Thamrin No. 57,
Gondangdia, Menteng. Jakarta Pusat 10350
Tlp: 3903238 Fax: 3903245
Website: www.mitsuilease.co.id

Mizuho Balimor Finance

MIZUHO BALIMOR FINANCE

Graha 137 Lt 7, Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta.
Tlp: 639 3877 Fax: 628 7950

MNC FINANCE

MNC Financial Center Building 12th Floor,
Jl. Kebon Sirih No. 21-27. Jakarta Pusat 10340
Tlp: 2970 1111 Fax: 3929938

MNC GUNA USAHA INDONESIA (MNC LEASING)

MNC Tower Lt.23. Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Kebon Sirih,
Jakarta Pusat 10340
Tlp: 3910993 Fax: 3911093

MULTINDO AUTO FINANCE
Jl. Pandanaran No. 119A, Semarang 50243
Tlp: (024) 8311130
Fax: (024) 8445254, 8445650

MUTIARA MULTI FINANCE
Aldeoz Building Lt.5,
Jl. Warung Bucit Raya No.39, Kec.Pancoran
Jakarta Selatan 12740
Tlp: 27534112 Fax: 27534494

NATIONAL FINANCE
Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok B 32
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Kel. Gandaria Selatan,
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12420
Tlp: 7507839 Fax:

NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA
South Quarter Tower C Lantai 16 Unit A-I
Jl. RA Kartini Kav. 8 RT/RW 010/004
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
Tlp: 80670388

NUSA SURYA CIPTADANA
Jl. Brigjen Katamso No. 5, Kel.
Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat
Tlp: 568 5000/3520504 Fax: 564 7732

ORIX INDONESIA FINANCE
Wisma Keiai, 24th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta
Tlp: 572 3041 Fax: 572 3074

OTOMAS MULTI FINANCE
Komp. Dutamas Fatmawati Blok B.1 No. 25-26,
Jl. Raya Fatmawati No. 39,
Jakarta 12150
Tlp: 722 0279 Fax: 722 0881

OVO FINANCE INDONESIA
Jl. Lippo Kuningan Lt. 17 Unit D
Jl. HR Rasuna Said Kav B-12
Jakarta 12940

OTO MULTARTHA
Gedung Summitmas II, Lantai 18,
Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Jakarta
Tlp: 522 6410 Fax: 522 6424
Website: www.oto.co.id

PACIFIC MULTI FINANCE
Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12A
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710
Tlp: 39506144

PANEN ARTHA INDONESIA MULTI FINANCE
Terusan Bandeng Utara No. 16 B 3-4
Jakarta Utara
Tlp: 661 5163/64 Fax: 668 5906

PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Gedung PT. PANN, Jl. Cikini IV No. 11
Jakarta Pusat
Tlp: 3192 2003 Fax: 3192 2980

PARAMITRA MULTIFINANCE
Kompleks Simprug Gallery,
Jl. Teuku Nyak Arief No.10-R, Jakarta 12220
Tlp: 727 87845 Fax: 727 87846
Website: www.pmf.co.id

PEFINDO BIRO KREDIT
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 5154501

PERMATA FINANCE INDONESIA
Gedung Waringin Group Lantai 3
Jl. Kesehatan No 22, Jakarta Pusat 10150
Tlp: 3867319 Fax: 3867321

POOL ADVISTA FINANCE
Jl. Soepeno Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau,
Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Tlp: 80626300

PPA FINANCE
Sampoerna Strategic Square 9th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta
Tlp: 5795 1419 Fax: 5795 1420

PRATAMA INTERDANA FINANCE
Wisma SMR Ground Fl,
Jl. Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta 14350
Tlp: 650 2222 Fax: 650 8141

PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE
Menara Sentraya Lt.15
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Tlp: 27882088 Fax: 27882084

PROLINE FINANCE INDONESIA
Plaza Asia Lt. 8A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Tlp: 51401260 Fax: 51401267

RABANA INVESTINDO
Jl. Tomang Raya No. 48A, Jakarta 11430
Tlp: 566 9808-10 Fax: 567 1646, 566 9820

RADANA BHASKARA FINANCE
Gedung Bluegreen.
Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 88
Cengkareng, Jakarta Barat
Tlp: 2952 7300 Fax: 2952 7301

RAMA MULTI FINANCE
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2DE
Jakarta Selatan 12790
Tlp: 7996345 Fax: 7996445

REKSA FINANCE
Ruko Patal Senayan
Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan
Blok B No. 3 & 5, Grogol Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
Tlp: 57940662 Fax:

RESONA INDONESIA FINANCE
Menara Mulia Building 7 Fl Suite 701
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11,
Jakarta Selatan 12930
Tlp: 570 1956 Fax: 570 1961

RIDEAN FINANCE
Jl. Pemadam Kebakaran No. 11,
Jakarta Pusat 10410
Tlp: 633 1032, 633 2027 Fax: 633 1032

RINDANG SEJAHTERA FINANCE
Gedung Jaya Lt. 3, Jl. MH Thamrin No. 12, Jakarta.
Tlp: 2300919 Fax: 2300919

SADIRA FINANCE
Menara Global Lt. 21
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 52892097

SAHABAT FINANSIAL KELUARGA
Metropolitan Tower 3rd Floor,
Jl. RA Kartini-TB Simatupang Kav. 14,
Jakarta Selatan 12430
Tlp: 27652022 Fax: 27652023

SAISON MODERN FINANCE
Menara Rajawali Lantai 10
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 57950571

SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA
AXA Tower Lt.32 Suite 03, Kuningan City
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Tlp: 30480655 Fax: 30480755

SATYADHIKA BAKTI MULTI FINANCE
Jl. Raya Kedung Baruk No.25-28,
Surabaya 60271
Tlp: (031) 9900-4250 Fax: (031) 9900 4254

SGMW MULTIFINANCE INDONESIA
Sinarmas MSIG Tower Lt. 43
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, Jakarta
Tlp: 22535050 Fax:

SHAKTI TOP FINANCE
Gedung Top Center Jl. KH Hasyim Ashari
No. 13-13A, Jakarta Pusat
Tlp: 63866017 Fax: 6306880

SHARIA MULTIFINANCE ASTRA
Gedung Menara FIF Lt.3 Suite 303
Jl. TB Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Tlp:7698899 Fax:75905599

SHINHAN INDO FINANCE
Wisma Indomobil I Lt. 10,
Jl. MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta 13330
Tlp: 857 9095 Fax: 857 4171

SINARMAS HANA FINANCE
Gedung Roxy Square Lt. 3
Blok B 01 No. 2, Jakarta Barat 11440
Tlp: 56954670 Fax: 56954678

SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
Gedung Agro Plaza Lt. 17
Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 No.1
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80864900 Fax: 80864950

SINARMAS MULTIFINANCE
Gedung Sinartama Gunita Lantai 3,
Jl. Lombok No. 71, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Tlp: 319 02888 Fax: 319 03589

SMART MULTI FINANCE
Komplek Perkantoran Foresta Business Loft 2
No. 21 BSD City, Kel. Lengkong Wetan,
Kec. SerpongTangerang Selatan.
Tlp: 30032968

SMFL LEASING INDONESIA
Menara BTPN Lt.31,
Jl. Dr. Ide. Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6 Kawasan
Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 80628710 Fax: 80628719

STACO ESTIKA SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12950
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220
Website: www.autocybercenter.com

STAR FINANCE
Wijaya Grand Center Blok H / 12A.
Jl. Wijaya II Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Tlp: 7211280 Fax: 7254336

SUMMIT OTO FINANCE
Summitmas II, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190
Tlp: 252 2788, 522 6601 Fax: 252 6388
Website: www.otofinance.co.id

SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE
Jl. Sahid Sudirman Center Lantai 50 Unit A dan E.
Jalan Jend. Sudirman No.86
Jakarta Pusat 10220

SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
18 Office Park Lantai 23,
Jl. TB Simatupang No. 18. Jakarta 12520
Tlp: 781 7555 Fax: 781 9111, 788 47224

SUZUKI FINANCE INDONESIA
Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung
Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung
Jakarta Timur 13920
Telp: (021) 8060 7000

SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE
Jl. TB Simatupang No. 90
Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220
Website: www.autocybercenter.com

SWADHARMA NUSANTARA PEMBIAYAAN
Komplek Ruko Ciledug Mas
JL.HOS Cokroaminoto Blok C No.17-18
Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 15157
Tlp: 22270817 Fax: 22270818

TAKARI KOKOH SEJAHTERA
Jl. Arjuna Utara No. 131, Tanjung Duren Selatan,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Tlp: 564 0101 Fax: 560 3550

TEMPO UTAMA FINANCE
Tempo Scan Tower Lt. 3
Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan
Tlp: 29667879

TEZ CAPITAL AND FINANCE
Wisma GKBI Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Tlp: 5741173 Fax: 5741239

KDB TIFA FINANCE
Tifa Building 4th Floor.
Jl. Kuningan Barat 26, Jakarta Selatan
Tlp: 520 0667, 525 2029, Fax: 522 9273, 526 2425
Website: www.tifafinance.co.id

TIRTA FINANCE
Pacific Century Place, It 17, Jl Jend Sudirman Kav 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta
Tlp: 50847818

TOPAS MULTI FINANCE
Mayapada Tower 2, Lantai 14 unit 01A, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 27, Kelurahan Karet, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan
Tlp: 2524433

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
The Tower Lt. 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 12. Jakarta Selatan 12930
Tlp: 50821500 Fax: 50821501

TRANSPACIFIC FINANCE
Perkantoran Grogol Permai Blok G24
Jl. Prof. Dr. Latumenten Grogol, Jakarta 12980
Tlp: 5010 2222 Fax: 567 9406

TRIHAMAS FINANCE
Trihamas Building, Jl. TB Simatupang Kav. 11,
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 2933 0533 Fax: 2933 0543/44

TRIHAMAS FINANCE SYARIAH
Trihamas Building Lt. Dasar
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.11
Tanjung Barat, Jakarta 12530
Tlp: 29330530 Fax: 29330529

TRIPRIMA MULTIFINANCE
Jl. Joglo Raya No. 17B, RT.007 RW.003
(Sebelah Biznet Pos Pengumben)
Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630
Telp: 22959040 Fax: 22959041

TRUST FINANCE INDONESIA
Gedung Artha Graha Lt. 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tlp: 515 5477 Fax: 515 5484

U FINANCE INDONESIA
Atria @Sudirman Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
Tlp: 5711 109 Fax: 573 1139
Website: www.ufinance.co.id

USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA
Menara Batavia Lt. 27
Jl. K. H. Mas Mansyur Kav 126 Jakarta
Tlp: 5793 0008 Fax: 5793 0028

VARIA INTRA FINANCE
Asean Tower Jl. KH. Samanhudi No.10 It. 7.
Jakarta 10710
Tlp: 380 2865 Fax: 384 1015

VERENA MULTI FINANCE
Gedung Bank Panin Lt. 3,
Jl. Pecenongan no. 84,
Jakarta Pusat 10120
Tlp: 350 4890 Fax: 350 4891

WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
Altira Office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350
Tlp: 21882400 Fax: 21882420

WANNAMAS MULTI FINANCE
Plaza Ciputat Mas blok C/L
Jl. Ir. H. Djuanda No. 5 Ciputat,
Tangerang Selatan.
Tlp: 021-7426599

WOKA INTERNATIONAL FINANCE
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 38, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Tlp: 315 7501; 392 1358 Fax: 319 02809

Bagi anggota APPI yang ingin mencantumkan logo perusahaan
harap menghubungi sekretariat APPI di No. Telp: (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

upcoming event

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

Sekretariat APPI

Kota Kasablanka

(EightyEight@Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D

Telp: (62-21) 2982 0190,

Fax: (62-21) 2982 0191,

Email: sekretariat@ifsa.or.id

Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat

TANPA SURAT REFERENSI

DENGAN SURAT REFERENSI

- Sistem Informasi LSPPI memfasilitasi perusahaan dengan menu referensi pengunduran diri karyawan nya yang sudah bersertifikasi yaitu dengan pilihan "Dengan Surat Referensi (DSR)" atau "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- Bila pegawai perusahaan tersebut berhenti baik - baik dan tidak bermasalah, maka perusahaan dapat melepaskan keterikatan data sertifikasi pegawai tersebut dengan status "Dengan Surat Referensi (DSR)".
- Sebaliknya bila pegawai tersebut terbukti melakukan tindakan fraud maka dapat dilepaskan dengan pilihan "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- Fasilitas ini adalah sarana komunikasi pasif antara perusahaan pembiayaan karena seluruh data pegawai yang masuk dalam DSR/TSR ini dapat dilihat oleh seluruh perusahaan pembiayaan lainnya.
- Perusahaan pembiayaan dapat memanfaatkan menu pengunduran diri ini sebaik mungkin dan berkomitmen untuk hanya merekrut pegawai yang sudah tersertifikasi dengan status DSR, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun integritas karyawan dan akhirnya membuat industri pembiayaan semakin maju dan baik.

BCAfinance

solusi tepat pembiayaan anda

FIX & CAP

TENOR

6

TAHUN

**ANGSURAN
LEBIH MURAH**